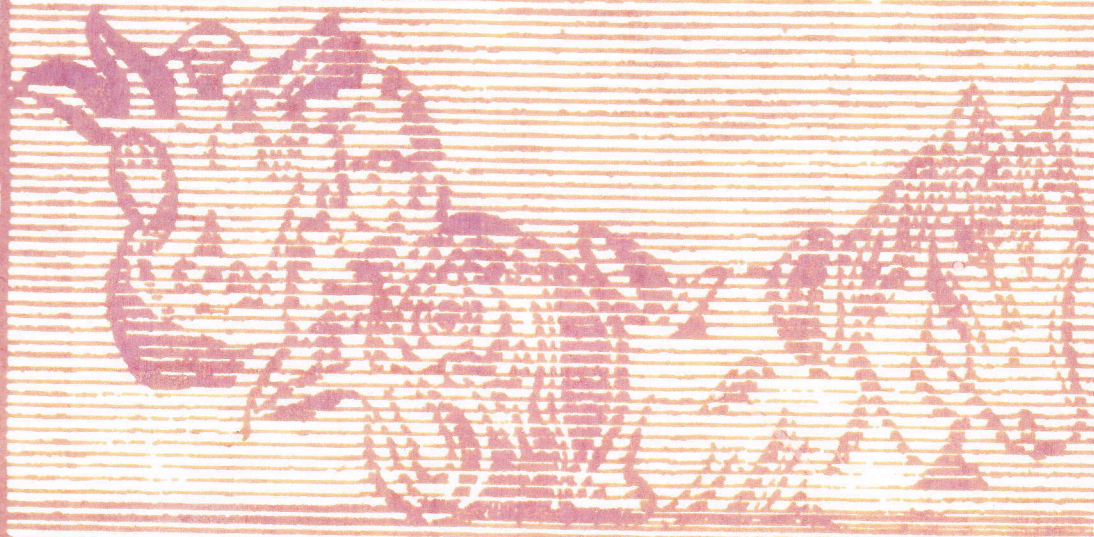




**Jurnal**

VOLUME 28  
JANUARI 2009

ISSN 0852 - 2626



*media informasi civitas academica  
fakultas peternakan universitas sam ratulangi*

**JURNAL ZOOTEK ( "ZOOTEK" JOURNAL)**  
**INTERNATIONAL STANDARD OF SERIAL NUMBER**

**(ISSN) 0852-2626**

**diterbitkan oleh (was published by)**

**FAKULTAS PETERNAKAN, UNIVERSITAS SAM RATULANGI**  
**(Faculty of Animal Science, Sam Ratulangi University)**  
**MANADO – INDONESIA**

**PENASEHAT (CONSELOR)**

**Prof. Dr.Ir. Dolfie Mokoagouw, MS**

**PEMIMPIN PENGELOLA /EDITOR (CHIEF IN EDITORIAL  
MANAGEMENT)**

**Prof. Ir. Vicky V. J. Panelewen, M.Sc.,PhD**

**DEWAN PENYUNTING**

**Prof.Dr.Ir.I.M. Nitis, MSc, Prof.Dr.Ir.D.A.Kaligis,DEA;Prof.Dr.Ir.B.Tulung,DEA;  
Prof.Dr.Ir.L.W.Sondakh,MEc.,Prof.Dr.Ir.D.R.Mokoagouw,MS., Prof.Drh.Budiarso,MSc.,  
Prof.Ir.V.V.J.Panelewen,MSc,PhD.Prof.Dr.Ir.M.Najoan,MS., Dr.Ir.F.N.Sompie,MS,  
Dr.Ir.H.Kiroh,MS.,Dr.Ir.Ch.Kaunang,MS.,Dr.Sri Adiani, Dr.Endang Pudjiastuti.,  
Dr.F.S. Oley,MS**

**TIM PENGELOLA/ EDITOR (EDITORIAL MANAGEMENT TEAM)**

**Ir.Jola J. M. R. Londok, MSi, dan Ir.Umar Papatungon,MSc.**

**ADMINISTRASI (STAFF OFFICERS)**

**Ir. S.K. Dotulong**

Jurnal Zootek (ISSN 0852-2626) terbit 2 kali setahun. Harga langganan Rp. 30.000 per edisi atau Rp. 60.000 per tahun. Redaksi menerima sumbangan tulisan/karya ilmiah hasil-hasil penelitian di bidang ilmu peternakan dan atau yang terkait dengan peternakan, yang belum pernah dipublikasikan dalam jurnal lainnya ("Zootek" Journal (ISSN 0852-2626) is published secondly (every 6 months) per year. The annual price of customer is Rp. 60,000 or Rp. 30,000 per edition. Team receives original papers both in animal sciences or animal husbandry, which were not published by other Journal).

**Alamat Redaksi (Business Office Address)**  
**Fakultas Peternakan, Universitas Sam Ratulangi**  
**Kampus Unsrat Bahu-Manado Sulawesi Utara, 95115**  
**Telp. (0431)-863186**

## DAFTAR ISI (CONTENTS)

Daftar isi (Contents) ..... ii

1. **Analisis Biaya dan Keuntungan pada Perusahaan Peternakan Babi Di Kota Tomohon (Study Kasus).** (Cost Analysis and Advantage of Pig Farm In Tomohon City, Case Study). **Franky N. S. Oroh; 1-13.**
2. **Analisis Ekonomi pada Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur Di Kota Manado.** (Economic Analysis On Poultry Farm (Laying Hen) In Manado City). **J. Poluan dan B. Roringpandey; 14-20.**
3. **Analisis Keuntungan Berdasarkan Skala Usaha Kepemilikan Ternak Sapi Di Kabupaten Minahasa.** (Advantage Analysis Based on Beef Farm Ownership Scale In Minahasa Regency). **J. Pandey; 21-33.**
4. **Analisis Komoditas Unggulan Peternakan Sapi Di Kawasan Agropolitan Pakakan Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara.** (Analysis of Beef Priority Commodity on Area of Pakakaan Agropolitan In Minahasa Regency, North Sulawesi Province). **T. F. Lumi; 34-42.**
5. **Analisis Kontribusi Subsektor Peternakan terhadap Pembangunan Ekonomi Kota Tomohon.** (Contribution Analysis of Livestock Sector on Economic Development in Tomohon City). **T.F. Lumi dan Franky N.S. Oroh; 43-59.**
6. **Efek Rekayasa Jerami Jagung dengan Beberapa Teknik Suplementasi Urea terhadap Kecernaan Zat-Zat Makanan pada Sapi Potong.** (Engineering Effect of Corn Straw with Several Urea Supplementation Techniques on Nutrient Digestibility in Beef Cattle). **M. R. Waani; 60-65.**
7. **Efek Suplementasi Vco (Virgin Coconut Oil) dengan Metode Berbeda terhadap Kecernaan In vitro Ransum Berbasis Serat Kasar Tinggi.** (Effects of Virgin Coconut Oil (VCO) Supplementation with Different Method on Ration In vitro Digestibility Based on Higher Crude Fiber). **Jola J.M.R. Londok, John E.G. Rompis dan Mursye N. Regar; 66-74.**
8. **Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Partisipasi Peternak dalam Penyusunan Program Penyuluhan Peternakan.** (factors related to breeders partisipation on preparation of animal farm extension program). **R.A.J. Apituley; 75-83.**
9. **Pengaruh Pemanfaatan Tepung Limbah Kulit Kopi dalam Ransum terhadap Efisiensi Penggunaan Makanan Ternak Ayam Pedaging Fase Akhir.** (Utilization Effect of Coffee Husk Waste Product in Ration on Feed Efficiency of Finishing Broiler). **H. Liwe dan Rustandi; 84-91.**
10. **Peranan Pasar "Blantik" dalam Menunjang Penjualan Ternak Sapi Di Kabupaten Minahasa.** (The Role of Exchange-Market in Supporting Beef Cattle Selling In Minahasa Regency). **Femi H. Elly; 92-103.**

11. **Posisi Kelelawar yang Tertangkap dijaring Di Cagar Alam Tangkoko–Duasudara Sulawesi Utara.** (Bat Position in Net Catcher Around Tangkoko-Duasudara Nature Reserve. North Sulawesi). **Henry J. Lengkong dan Indyah Wahyuni; 104-110.**
2. **Produktivitas Sapi Peranakan Ongole yang Disuplementasi Pakan Urea Sagner Gula Merah Blok Dan Tinja Ayam Fermentasi.** (Productivity of Ongole Crossbred Beef Cattle Consumed Sugar Block Using Fermented Chicken Manure). **Umar Paputungan, J. H. Manopo dan J. J. Pelealu; 111-125.**

Petunjuk untuk penulis naskah (Direction for script writer) . . . . iv

## PERANAN PASAR "BLANTIK" DALAM MENUNJANG PENJUALAN TERNAK SAPI DI KABUPATEN MINAHASA

Femi H. Elly<sup>\*)</sup>

Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi Manado, 95115.

### ABSTRAK

Sebagian besar petani di Sulawesi Utara terutama di Kabupaten Minahasa menjual ternaknya di pasar "blantik". Pasar "blantik" merupakan tempat berkumpulnya pedagang-pedagang pengumpul dan pedagang pengecer (tukang potong). Transaksi penjualan ternak sapi baik melalui pedagang, tukang potong atau petani lainnya selalu menggunakan perantara. Pertanyaannya sejauh mana peranan pasar "blantik" terhadap penjualan ternak sapi di Sulawesi Utara. Apakah transaksi di pasar "blantik" dapat memberikan insentif bagi petani dan perantara. Penjualan di pasar "blantik", ternak sapi sudah tersedia dan diperagakan oleh perantara. Transaksi terjadi setelah ada negosiasi antara petani, perantara dan pedagang. Apabila pedagang berminat terhadap ternak sapi maka pedagang menghubungi perantara yang memperagakan ternak tersebut. Kemudian terjadi tawar menawar ternak sapi. Yang menarik di pasar "blantik", perilaku yang terjadi selain dapat memberikan pendapatan bagi penjual ternak (petani) juga terhadap perantara. Pengunjung yang datang di pasar "blantik" bukan hanya pembeli atau penjual atau tukang blantik tetapi juga masyarakat sekitar khusus untuk menonton transaksi-transaksi yang terjadi. Pasar "blantik" ini juga memberikan pemasukan bagi pemerintah baik pemerintah daerah maupun Dinas Kehewan Kabupaten Minahasa melalui retribusi dan biaya administrasi. Pasar

"blantik" dapat dijadikan objek wisata di Sulawesi Utara.

**Kata Kunci:** Peranan, Pasar "blantik", Ternak Sapi

### ABSTRACT

THE ROLE OF EXCHANGE MARKET IN SUPPORTING BEEF CATTLE SELLING IN MINAHASA REGENCY. Most of farmers in North Sulawesi sold their cattle at exchange market called "pasar blantik". Exchange market was place where all animal sellers sold their cattle. Selling transaction of cattle can be done through animal sellers, animal slaughters and other animal exchangers. Objective of this study was to evaluate the role of exchange market in supporting beef cattle selling in Minahasa regency, North Sulawesi province and to evaluate incentive income of animal sellers due to selling transaction of cattle at exchange market. Animal selling at exchange market had been available and operated by animal sellers. Transaction had occurred after negotiation among farmers as animal owner, animal sellers and other animal buyers. When animal sellers were interested in animals, they communicated with farmers as animal owners showing their cattle. In this communication, supply and demand were occurring between animal sellers and farmers as animal owners. In this transaction, they had considered their advantage income to each other. Visitors coming at exchange market were not only farmers and animal sellers, but also other communities seeing the transaction system. Animal exchange market also gave income to local

\* Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan

government through retribution and administrative cost. In addition, animal exchange market can also be a tourism object in North Sulawesi province.

**Keywords:** *Role of exchange market, Beef cattle, Minahasa regency*

## PENDAHULUAN

Peternakan di Sulawesi Utara merupakan salah satu bagian dalam pembangunan sektor pertanian. Kegiatan ekonomi yang berbasis peternakan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki prospek ke depan. Secara geografis, Sulawesi Utara adalah salah satu daerah yang sangat strategis untuk kawasan Asia Pasifik merupakan pintu gerbang lalu lintas keluar masuknya aneka barang perdagangan. Keadaan ini memberikan peluang pasar bagi usaha-usaha yang ada termasuk usaha ternak sapi.

Ternak sapi merupakan ternak terpenting dari jenis ternak yang dipelihara manusia sebagai sumber daging dan susu. Selain itu, sapi berperan sebagai sumber pendapatan, tabungan, aset kultural dan religius, tenaga kerja pengolah lahan, sumber gas bio dan pupuk kandang. Dalam hal ini ternak sapi sebagai aset Sulawesi Utara merupakan plasma nutfah yang harus dipertahankan populasinya. Ternak sapi di Sulawesi Utara adalah sapi lokal yang dinyatakan dengan sapi "dwi fungsi" yaitu sebagai sapi tipe pekerja sekaligus tipe pedaging.

Sebagian besar petani di Sulawesi Utara terutama di Kabupaten Minahasa menjual ternaknya di pasar "blantik". Pasar "blantik" merupakan tempat berkumpulnya pedagang-pedagang pengumpul dan pedagang

pengecer (tukang potong). Pedagang-pedagang pengumpul tersebut berasal dari daerah Sulawesi Utara dan luar provinsi. Di daerah lain seperti Jawa Timur, NTB dan Bali, pasar tempat terjadinya penjualan ternak sapi disebut sebagai pasar hewan (Ilham, *et al.* 2002; Kariyasa dan Kasryno, 2004 dan Yusuf, *et al.* 2004).

Permasalahannya, peternak di Sulawesi Utara sering diperhadapkan dengan pemasaran yang tidak menguntungkan. Hal ini seperti harga jual yang rendah, penentuan harga berdasarkan taksiran dan panjangnya rantai pemasaran. Dalam melakukan transaksi penjualan sapi, petani di Sulawesi Utara menggunakan perantara. Sebagai balas jasa, petani memberikan upah kepada perantara. Berapa besar upah yang diberikan juga ditentukan oleh perantara. Upah perantara tersebut dinyatakan sebagai biaya transaksi (Elly, 2008).

Pasar "blantik" di Sulawesi Utara yang sudah lama dikenal dan terletak di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa, kegiatannya jual beli dan tukar tambah (barter) ternak sapi. Kegiatan ini dilakukan oleh petani setiap minggu sekali pada hari Kamis. Penelitian Suwandi (2005) menunjukkan penjualan ternak sapi di Kabupaten Sragen juga melalui blantik. Blantik menurut Suwandi sama dengan pedagang perantara yang wilayah kerjanya meliputi tingkat dusun, desa sampai lintas kabupaten. Di Sragen penguasaan pasar didominasi oleh keberadaan blantik yang lebih mempunyai posisi tawar, walaupun dengan modal yang terbatas. Karakteristik ini berbeda dengan di Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara penjualan sapi dilakukan di pasar

"*blantik*" dan transaksinya terjadi melalui perantara. Perantara yang dimaksud adalah orang yang menjadi penghubung antara petani dan pedagang sapi di pasar "*blantik*". Pertanyaannya sejauh mana peranan pasar "*blantik*" terhadap penjualan ternak sapi di Sulawesi Utara. Apakah transaksi di pasar "*blantik*" dapat memberikan insentif bagi petani dan perantara. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada maka penulisan artikel ini bertujuan menganalisis peranan pasar "*blantik*" terhadap aktivitas penjualan ternak sapi. Tujuan lain adalah menganalisis implikasi kebijakan pemerintah terhadap adanya pasar "*blantik*" di Sulawesi Utara.

#### MATERI DAN METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di pasar "*blantik*" kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa dengan menggunakan metode studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data *cross section* dan data *time series*, dengan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer (*cross section* setahun) diperoleh dari wawancara langsung dengan responden. Sedangkan data sekunder (*time series* tahunan) diperoleh dari instansi yang terkait dengan penelitian ini serta data hasil penelitian yang dipublikasi (Sinaga, 1996).

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah sistem penjualan ternak sapi, peranan pasar "*blantik*", transaksi penjualan dan kebijakan pemerintah. Sistem penjualan ternak sapi diukur dari saluran distribusi yang terjadi di pasar "*blantik*". Peranan

pasar "*blantik*" yang diukur dari bagaimana kegiatan-kegiatan dan transaksi yang dilakukan setiap minggu di pasar tersebut. Transaksi penjualan diukur dari terjadinya transaksi penjualan ternak sapi di pasar "*blantik*". Kebijakan pemerintah diukur dari peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah berkaitan dengan penjualan ternak sapi di Sulawesi Utara.

Metode analisis yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk menjawab tujuan digunakan analisis deskriptif dengan tabulasi data yaitu memberikan gambaran-gambaran umum. Analisis deskriptif dilakukan dengan mengkaji fenomena-fenomena di lapangan dengan terperinci dengan mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

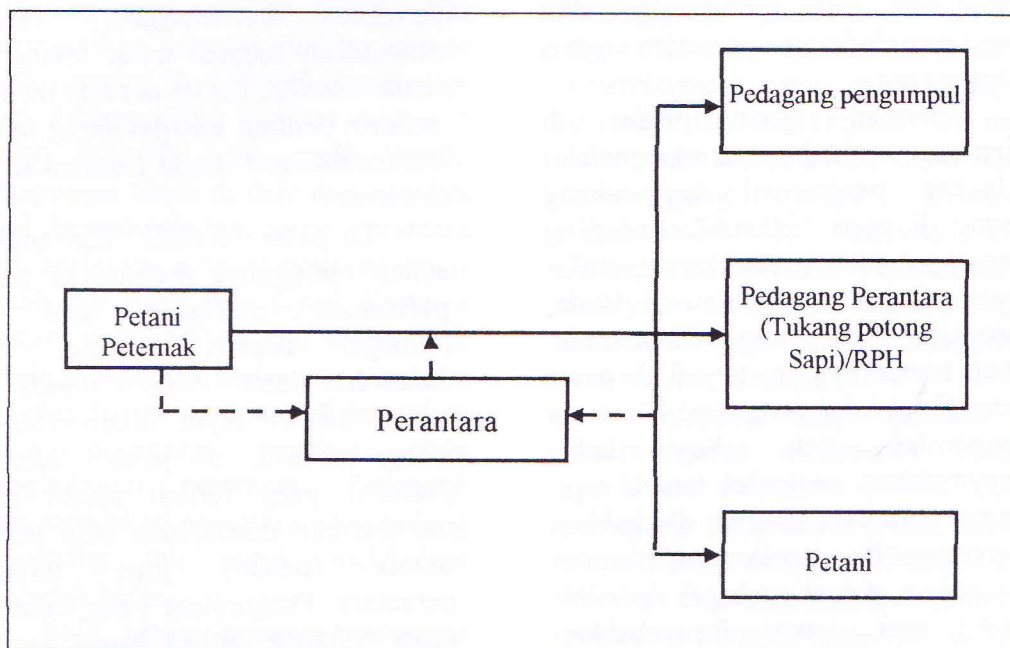
##### Sistem Penjualan Ternak Sapi

Petani di Sulawesi Utara menjual ternak sapi karena adanya kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga tersebut diantaranya adalah : bila ada anggota keluarga yang sakit, kebutuhan pendidikan anak, kebutuhan membangun rumah, membeli lahan pertanian, untuk membeli input pertanian dan lain sebagainya (Kariyasa dan Kasryno, 2004; Elly, 2008).

Penjualan ternak sapi di Sulawesi Utara berbeda-beda untuk setiap petani. Penjualan ternak sapi tersebut melalui pedagang maupun petani lain. Pedagang yang dimaksud adalah pedagang lokal dan pedagang luar daerah. Pedagang adalah pedagang pengumpul dan pedagang pengecer sebagai tukang potong sapi.

Transaksi penjualan ternak sapi baik melalui pedagang, tukang potong atau petani lainnya selalu menggunakan perantara (Gambar 1). Perantara di pasar "blantik" Sulawesi Utara sebagian besar adalah bukan blantik. Di Jawa Timur, NTB, Bali dan NTT, perantaranya adalah tukang blantik (Kariyasa dan Kasryno, 2004). Sedangkan di Sumatera Barat tukang blantik disebut toke (Ali, *et al.* 2004). Hasil penelitian Elly (2008) menunjukkan sebagian besar peternak

di Minahasa menjual ternak sapi di pasar "blantik". Sedangkan peternak di Bolaang Mongondow sebagai besar menjual ternak sapi dengan didatangi pedagang. Berbeda dengan penjualan sapi di Jawa Timur, NTB dan Bali. Menurut Ilham, *et al.* (2002), Kariyasa dan Kasryno (2004) bahwa petani menjual sapi ke pedagang pengumpul dan penjagal. Pedagang pengumpul dan penjagal yang menjual sapi di pasar hewan.



Gambar 1. Sistem Penjualan Ternak Sapi di Pasar "Blantik"



Berdasarkan Gambar 1 terlihat transaksi ternak sapi yang terjadi di pasar "*blantik*" yaitu dari petani ke pedagang pengumpul, pedagang perantara (tukang potong sapi) ataupun ke petani lain. Transaksi penjualan sapi di pasar "*blantik*" tersebut terjadi melalui perantara (garis putus-putus). Fenomena ini menunjukkan transaksi terjadi tidak langsung antara petani dan pedagang, tetapi sebelumnya terjadi negosiasi antara petani dan perantara. Fenomena lain, apabila pedagang akan membeli ternak sapi, maka pedagang tersebut akan menghubungi perantara (garis putus-putus).

Sebagian besar petani di Minahasa menjual ternak sapi melalui pedagang pengumpul dan tukang potong di pasar "*blantik*". Pedagang pengumpul yang melakukan transaksi berasal dari daerah Sulawesi Utara, Gorontalo, Palu dan Kalimantan. Setiap transaksi yang terjadi di pasar "*blantik*" melalui perantara. Perantara memperoleh upah sebagai balas jasanya dalam penjualan ternak sapi. Adanya perantara tersebut disebabkan karena terjadinya *asymetri information* di tingkat petani sebagai pemilik ternak sapi yang menyebabkan terjadinya biaya transaksi.

### **Peranan Pasar "*Blantik*" Dalam Menunjang Aktivitas Penjualan Ternak sapi**

Pasar "*blantik*" di Sulawesi Utara berfungsi sebagai tempat jual beli dan tukar ternak sapi. Tempat jual beli ternak sapi di Jawa Timur, NTB dan Bali (Ilham, *et al.* 2002; Kariyasa dan Kasryno, 2004) dan di NTT (Yusuf, *et al.* 2004) disebut sebagai pasar hewan. Saat ini menurut Dewi

(2008), penjualan ternak sapi potong di NTB dilakukan di pasar lelang "*forward*" agro. Pasar lelang agro yang berbetuk "*forward*" berfungsi mempercepat penyerapan komoditas yang dihasilkan petani termasuk sapi potong. Pasar lelang "*forward*" merupakan bentuk pasar yang penyerahan dan penyelesaian transaksi dilakukan kemudian. Penjual membawa contoh komoditas yang harganya telah ditetapkan sebelum transaksi. Trobos melaporkan adanya kelembagaan pemasaran modern di Jerman. Kelembagaan tersebut dinyatakan sebagai pasar lelang atau *cattle auction*. *Cattle auction* memiliki peranan penting sebagai ujung tombak kesinambungan usaha peternakan sapi di Jerman.

Di pasar "*blantik*" Kawangkoan setiap minggunya merupakan tempat pertemuan pedagang sapi dari berbagai daerah maupun lokal Sulawesi Utara. Pasar "*blantik*" ini sudah berdiri sejak tahun 1960-an. Yang menarik di pasar "*blantik*", perilaku yang terjadi selain dapat memberikan pendapatan bagi penjual ternak (petani) juga terhadap perantara. Pengunjung yang datang di pasar "*blantik*" bukan hanya pembeli atau penjual atau tukang *blantik* tetapi juga masyarakat sekitar khusus untuk menonton transaksi-transaksi yang terjadi. Transaksi di pasar "*blantik*" tersebut terjadi sekali dalam seminggu yaitu setiap hari kamis. Pasar "*blantik*" ini juga memberikan pemasukan bagi pemerintah baik pemerintah daerah maupun Dinas Kehewanan Kabupaten Minahasa melalui retribusi dan biaya administrasi.

Seperti telah dikemukakan di atas, pasar "*blantik*" di Sulawesi Utara

terletak di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. Pasar "*blantik*" ini merupakan pasar yang besar dan paling ramai dibanding pasar "*blantik*" lainnya. Ternak sapi sebelum dijual diperagakan oleh perantara yang menunjukkan ternak sapi yang akan dijual adalah ternak sapi yang kualitasnya baik. Pedagang akan memilih ternak sapi yang kualitasnya baik agar dapat dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.

Perantara berfungsi untuk memperlihatkan kepada pedagang ciri-ciri yang menunjukkan ternak sapi dikategorikan sebagai kualitas nomor 1 atau nomor 2. Ciri-ciri ternak sapi yang dikategorikan kualitas nomor 1 adalah kulitnya licin, putih bersih, mempunyai tanda di dahi dan ekornya kecil, bentuk tubuh simetris. Perantara juga berfungsi sebagai penaksir umur ternak sapi yang akan dijual. Caranya dengan menunjukkan gigi ternak sapi tersebut. Apabila pedagang berminat terhadap ternak sapi yang diperagakan maka pedagang tersebut akan menghubungi perantara. Pedagang akan mendekati perantara yang sedang memegang tali untuk melakukan negosiasi harga.

Baik petani maupun pedagang akan memanfaatkan perantara disebabkan kedua belah pihak tidak mempunyai informasi. Petani tidak mempunyai informasi siapa pembeli dan berapa berat badan ternaknya. Dalam hal ini perantaralah yang bisa menafsir berapa berat badan ternak sapi. Dilain pihak, pedagang tidak mempunyai informasi tentang kualitas ternak sapi yang akan dibelinya. Perantara juga melakukan negosiasi dengan petani tentang harga bayar yang diinginkan pedagang.

Setelah ada kata sepakat antara perantara dengan petani dan perantara dengan pedagang maka dilakukan pembayaran oleh perantara. Dalam hal ini perantara mendapat upah sekitar 10-20 persen dari petani. Di pasar "*blantik*" terdapat banyak perantara dan masing-masing perantara mendapat upah dari petani juga dari pedagang. Berapa besar perantara mendapat upah dari pedagang atas jasanya dalam pembelian ternak belum ada informasi yang jelas. Dalam hal ini pasar "*blantik*" berperan dalam peningkatan pendapatan perantara. Pasar "*blantik*" merupakan salah satu kelembagaan yang dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan. Di daerah lain perantara (*blantik*) lebih banyak menanggung biaya pemasaran (Pasandaran dan Kasryno, 2004). Selanjutnya menurut Pasandaran dan Kasryno (2004), adanya pasar "*blantik*" juga dapat memberikan insentif bagi pedagang.

Pedagang antar provinsi dan antara pulau melakukan transaksi pembelian di pasar "*blantik*". Disini pedagang pengumpul dapat memilih ternak yang diinginkan untuk dijual kembali di daerah lain. Sebagian besar petani menjual ternaknya di pasar "*blantik*" (Tabel 1). Dalam hal ini pasar "*blantik*" sangat menunjang penjualan ternak sapi oleh petani. Hal ini disebabkan, pertama, lokasi petani di Minahasa berdekatan dengan pasar "*blantik*", sehingga ternak sapi dapat digiring tanpa menggunakan kendaraan. Kedua, sudah menjadi tradisi di Minahasa untuk menjual ternak di pasar "*blantik*" yang pada awalnya pasar "*blantik*" tersebut berfungsi sebagai tempat pertukaran ternak (*barter*).

**Tabel 1. Jumlah Petani Yang Menjual Ternak Sapi Menurut Lokasi Penjualan di Kabupaten Minahasa**

Lokasi Penjualan	Jumlah Petani	
	(Jiwa)	(%)
1. Pasar "blantik"	165	85.50
2. Dirumah Petani	29	14.50
Total	194	100.00

Sumber: Elly, 2008

Petani di Minahasa 85.50 persen (165 petani) menjual ternaknya di pasar "blantik", sisanya 14.50 persen menjual dirumah atau didatangi pedagang. Di Jawa Tengah penjualan sapi di pasar hewan dan ke desa-desa dilakukan oleh tukang blantik dan sekitar 10-15 % dijual oleh peternak di pasar hewan (Pramono, *et al.* 2004). Menurut Kariyasa dan Kasryno (2004), penjualan ternak di pasar hewan untuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan NTB hanya sekitar 5-10 %. Penjualan melalui blantik (bukan di pasar hewan) sekitar 70-90 %. Pasar "blantik" di Sulawesi Utara berfungsi untuk memperlancar pemasaran ternak sapi. Di Lampung menurut Widyantoro, *et al.* (2004), belum mempunyai pasar hewan. Hal ini merupakan kendala di Lampung sehingga menghambat kontinuitas pemasaran sapi.

#### **Kebijakan Pemerintah**

Ternak sapi merupakan ternak unggulan yang oleh pemerintah akan dijadikan sebagai ternak andalan Sulawesi Utara. Sulawesi Utara mempunyai potensi pengembangan usaha ternak sapi cukup tinggi jika ditinjau dari potensi sumberdaya alam seperti ketersediaan sumberdaya lahan, pakan, sumberdaya ternak, sumberdaya manusia serta permintaan.

Potensi permintaan baik untuk konsumsi daging lokal maupun antarpulau. Dalam hal ini, ternak sapi di Sulawesi Utara mempunyai masa depan dan potensi pasar yang menggembirakan. Selain memberikan tambahan pendapatan kepada petani, ternak sapi juga merupakan sumber pendapatan daerah melalui perdagangan ternak antar provinsi dan antar pulau (Elly, *et al.* 2008).

Pendapatan daerah bidang peternakan diperoleh dari izin usaha pertanian dan peternakan, pungutan retribusi ternak serta hasil-hasilnya. Kondisi tersebut merupakan wujud nyata otonomi daerah. Otonomisasi daerah didasarkan pada undang-undang No 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya adalah upaya pengelolaan sumberdaya alam untuk menunjang pembangunan daerah. Berkaitan dengan sub sektor peternakan telah ditetapkan beberapa peraturan daerah diantaranya PERDA No 10 Tahun 2000 tentang Rumah Potong Hewan (RPH), walaupun masih terbatas pada kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong dengan tarif Rp 4 000. Kemudian PERDA No 19 Tahun 2001 tentang Izin Usaha

Hasil Pertanian Peternakan serta pungutan retribusi. Pungutan retribusi menyangkut retribusi pengeluaran termasuk penjualan ternak, terutama pengeluaran ke luar daerah Sulawesi Utara (Pemda Bolaang Mongondow, 2005).

Tarif dan retribusi diatur berdasarkan PERDA provinsi Sulawesi Utara No 3 Tahun 2003. Besarnya keterangan pengeluaran/pemasukan ternak adalah Rp 50 000 dan pengeluaran/pemasukan bibit ternak (aneka ternak) adalah Rp 10 000. Sedangkan keterangan pengeluaran/pemasukan ternak potong Rp 25 000. Kenyataan di lapangan surat keterangan pengeluaran ternak sebesar Rp 10 000 rupiah dikenakan bagi pembeli. Bagi petani dikenakan Rp 10 000 per ekor setelah ternak sapi terjual dan Rp 2 000 per ekor setiap masuk pasar "blantik" (Elly, 2007). Dalam penelitian (Elly, 2008) biaya yang dikenakan saat ternak sapi terjual disebut biaya administrasi dan biaya masuk pasar "blantik" dinyatakan sebagai biaya retribusi. Biaya administrasi dan biaya retribusi merupakan komponen biaya transaksi (Elly, 2008). Implikasinya biaya transaksi adalah masalah yang mempengaruhi keputusan petani dalam produksi. Peningkatan biaya transaksi menyebabkan terjadinya kegagalan pasar (*market failure*). Biaya transaksi menurut Williamson (2008) berkaitan dengan kelembagaan. Investasi spesifik yang dinyatakan dalam menentukan susunan kelembagaan dinyatakan sebagai *fixed transaction cost* (Benham and Benham, 2001). Menurut Matungul, *et al.* (2006), biaya transaksi yang sangat tinggi dapat mempengaruhi pasar

input dan pasar output. Selanjutnya Dutilly-Diane, *et al.* (2003) mempelajari kegagalan pasar pada rumahtangga petani. Namun biaya retribusi belum diatur dalam PERDA provinsi Sulawesi Utara No 3 Tahun 2003 tersebut (Pemda SULUT, 2003).

Apabila kebijakan pemerintah seperti tercantum dalam PERDA di atas diberlakukan maka di satu sisi akan membantu petani namun disisi lain akan mengakibatkan petani menerima harga yang lebih kecil lagi. Laporan Lapangan dari Social Monitoring & Early Response Unit (SMERU), menyatakan bahwa sapi potong adalah komoditi andalan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Selatan (SULSEL) yang sebelum deregulasi, tata niaganya mengalami banyak distorsi. Selain adanya regulasi perdagangan melalui sistem kuota (nasional), komoditi ini juga menjadi "sapi perah" untuk sumber PAD (formal) dan sasaran pungutan liar (pungli) oleh oknum aparat pemerintah.

Berlakunya PERDA yang diputuskan pemerintah Sulawesi Utara tersebut diharapkan dapat meminimalkan pengeluaran ternak sapi keluar daerah. Untuk menjaga keseimbangan dan peningkatan populasi ternak sapi, pemerintah daerah provinsi Bali menetapkan beberapa peraturan. Peraturan tersebut adalah perdagangan sapi antar pulau dan pemotongan lokal ternak sapi harus lebih kecil dari angka kelahiran sapi (Dewi, 2008). Perdagangan sapi minimal 10 % dari populasi sapi. Pemerintah daerah Sulawesi Utara harus menetapkan kuota perdagangan antar pulau ternak sapi yang ditetapkan dengan PERDA seperti

yang dilakukan oleh Pemda provinsi Bali. PERDA yang memberatkan petani sebaiknya dipertimbangkan untuk dihilangkan atau dihapus. Hal ini seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur ada beberapa PERDA yang dihapus berdasarkan UU No 18 Tahun 1997 (Usman, *et al.*, 1999 dan Toyamah, *et al.*, 1999). Penghapusan beberapa pajak dan distribusi berkaitan dengan perdagangan ternak sangat membantu petani untuk meningkatkan pendapatannya. SMERU juga melaporkan bahwa ada 16 jenis pajak dan retribusi yang dibebankan kepada petani dan pedagang sapi potong di NTT dan ada 14 jenis untuk petani SULSEL. Sebelum deregulasi besarnya pungutan di NTT sekitar Rp. 90.000,-/ekor dan di Sulsel Rp. 32.000,-/ekor, atau masing-masing 13% dan 4% dari rata-rata harga di tingkat petani. Sejak tahun 1997, harga sapi potong di tingkat petani di NTT (Agustus 1998) meningkat rata-rata 30%, dan di SULSEL mendekati 100% (Pebruari 1999). Walaupun kenaikan harga yang diterima petani itu menurut SMERU bukan hanya akibat deregulasi, tetapi lebih disebabkan oleh krisis ekonomi (inflasi tinggi), dan bersamaan dengan meningkatnya permintaan (sebagai substitusi daging impor). Berdasarkan kasus seperti terjadi di NTT dan SULSEL diharapkan pemerintah Sulawesi Utara mempertimbangkan kembali PERDA yang memberatkan petani. Hasil pemantauan SMERU di NTT dan SULSEL menunjukkan bahwa deregulasi berdampak positif, setidaknya dilihat dari kepentingan petani dan pedagang yang selama ini dijadikan objek pungutan (formal dan informal). Pemerintah juga harus

memperhatikan keberadaan perantara dan perlu ditunjang dengan PERDA. Dalam hal ini keberadaan perantara sangat dibutuhkan. Menurut Pasandaran dan Kasryno (2004), keberadaan blantik masih sangat diperlukan peternak sapi di Lampung.

## KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang dan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pasar "*blantik*" berperan dalam aktivitas penyaluran ternak sapi dari petani ke pedagang (pedagang pengumpul dan pengecer atau tukang potong)
2. Transaksi yang terjadi di pasar "*blantik*" menjadi sumber pendapatan bagi perantara.
3. Adanya pasar "*blantik*" memudahkan petani untuk menjual ternaknya bila keadaan mendesak, dapat menjadi sumber pendapatan daerah dan dapat dijadikan objek wisata di Sulawesi Utara.

## SARAN

Berdasarkan kajian di atas maka dapat ditetapkan implikasi kebijakan yaitu :

1. Perlu intervensi pemerintah dalam penyediaan timbangan ternak sapi di pasar "*blantik*".
2. Beberapa PERDA perlu dideregulasi agar tidak memberatkan petani.
3. Perlu adanya PERDA yang memihak kepada perantara, namun dalam PERDA tersebut perlu penegasan berapa besar biaya perantara yang harus ditanggung petani.
4. Perlu regulasi penetapan bobot minimum penjualan ternak sapi.

5. Perlu regulasi agar tidak terjadi penjualan betina produktif dan sapi di bawah satu tahun.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., M. Boer dan Sadar. 2004. Pemasaran sapi Potong di Sumatera Barat. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian, Jakarta Selatan.
- Benham, A and L. Benham. 2001. Marketng Methods and Income Generation Amongst Small-Scale Farmers in Two Communal Areas of Kwazulu-Natal, South Africa. School of Agricultural Sciences and Agribusiness. University of Natal, Pietermaritz Burg, South Africa. Procceding. <http://ifmaonline.org/pages/onlineArticles.php>.
- Dewi, 2008. Sapi Potong Masih Menjadi Komoditi Andalan Dalam Setiap Pelaksanaan Pasar Lelang "Forward" Agro di Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Pusat Informasi Bisnis dan Investasi Daerah. Berita Daerah.Com. Berita 13 Oktober 2008.
- Dutilly-Diane, C., E. Sadoulet and A. de Janvry. 2003. Household Behavior Under Market Failures: How Natural Resource Management in Agriculture Promotes Livestock Production in the Sahel. Department of Agricultural and Resource Economics. University of California, Berkeley.
- Elly, F.H. 2007. Sistem Pemasaran Ternak sapi di Kabupaten Minahasa dan Peran Pemerintah. Jurnal Zootek ("Zootek" Journal). Vol. 25:214-226 (Juli 2007).
- Elly, F.H. 2008. Dampak Biaya Transaksi Terhadap Perilaku Ekonomi Rumahtangga Petani Usaha Ternak Sapi – Tanaman di Sulawesi Utara. Disertasi. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Elly, F.H., B.M. Sinaga, S.U. Kuntjoro dan N. Kusnadi. 2008. Pengembangan Usaha Ternak Sapi Rakyat Melalui Integrasi Sapi-Tanaman di Sulawesi Utara. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Indonesian Agricultural Research and Development Journal. Volume 27, Nomor 2, 2008. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian, Bogor.
- Ilham, N; K. Kariyasa dan W. Wiryono. 2002. Suatu Pemikiran Tentang Analisis Penawaran dan Permintaan Beberapa Jenis Daging Sapi di Indonesia. Forum Agroekonomi 20 (1) : 25-40.
- Kariyasa, K dan F. Kasryno. 2004. Dinamika Pemasaran dan Prospek Pengembangan Ternak Sapi di Indonesia. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian, Jakarta Selatan.
- Matungul, P.M., G.F. Ortmann and M.C. Lyne. 2006. Marketing Methods and Income Generation Amongst Small-Scale Farmers in

- Two Communal Areas of Kwazulu-Natal, South Africa. School of Agricultural Sciences and Agribusiness. University of Natal, Pietermaritzburg.
- Pasandaran, E dan F. Kasryno. 2004. Prospek dan Agenda Kebijakan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian, Jakarta Selatan.
- Pemerintah Bolaang Mongondow. 2005. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 114 Tahun 2005 Tentang Penyesuaian Struktur dan Besarnya Tarif Sementara Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Retribusi Penggantian Biaya cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan. Kabupaten Bolaang Mongondow, Kotamobagu.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. 2003. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan. Provinsi Sulawesi Utara, Manado.
- Pramono, D., C. setiani dan T. Prasetyo. 2004. Dinamika Pasar sapi Pootng di Jawa Tengah. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian, Jakarta Selatan.
- Sinaga, B.M. 1996. Metode Pengumpulan Data. Makalah Disampaikan pada Pelatihan Singkat Metodologi dan Manajemen Penelitian Bidang Pertanian, Cisarua Bogor 16-23 Desember 1996. Proyek Pengembangan Sebelas Lembaga Pendidikan Tinggi Bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Suwandi. 2005. Keberlanjutan Usahatani terpadu Pola Padi Sawah-Sapi Potong Terpadu Di Kabupaten Sragen : Pendekatan RAP-CLS. Disertasi Doktor. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Toyamah, N., V. Febriany, S. Sumarto dan J.L. Pomeroy. 1999. Deregulasi Perdagangan Regional dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Daerah Kasus : Jawa Timur. Laporan Lapangan dari Social Monitoring & Early Response Unit (SMERU), Suatu unit yang didukung oleh Bank Dunia, Aus AID, ASEM, dan USAID, Jakarta.
- Usman, S., M.S. Mawardi., N. Toyamah., V. Febriany, R.D. Montgomery and J.L. Pomeroy., 1999. Deregulasi Perdagangan Regional dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Daerah Kasus : Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta. Laporan Lapangan dari Social Monitoring & Early Response Unit (SMERU), Suatu unit yang didukung oleh Bank Dunia, Aus AID, ASEM, dan USAID, Jakarta.
- Widyantoro. A. Prabowo dan Soerachman. 2004. Kelembagaan Pemasaran Ternak

Sapi Potong di Timor Barat,  
Nusa Tenggara Timur. Badan  
Penelitian dan Pengembangan  
Pertanian. Departemen  
Pertanian, Jakarta Selatan.

Williamson, O.E., 2008. Transaction-  
Cost Economics: The  
Governance of Contractual  
Relations. University of  
Pennsylvania.

[http://www.jstor.org/pss/  
725118](http://www.jstor.org/pss/725118).

Yusuf; Masniah; M. Ratnada dan J.  
Nulik. 2004. Kelembagaan  
Pemasaran Sapi Potong di Timor  
Barat, Nusa Tenggara Timur.  
Badan Penelitian dan  
Pengembangan Pertanian.  
Departemen Pertanian, Jakarta  
Selatan.